PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SINTANG DI KECAMATAN SEPAUK PERIODE 2016-2021

Suparno

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sintang

Email : suparnowae4@gmail.com

Abstract

The problem in this research is how the form of political participation of novice voters, the extent to which voter voters' political participation and what factors influence the political participation of first-time voters in the Sintang District Regent election in Sepauk District 2016-2021. The purpose of this study is to determine the Beginner voters' political participation is to determine the extent of the partitioning of first-time voter politics and to describe the factors that influence the political participation of first-time voters in the Sintang Regency Regent election in District Supporting in 2016-2021. The research method used in this study is qualitative and a case study form. The technique of collecting data uses interview techniques and documentation. The results showed that: 1) the form of the participation of first-time voters in the implementation of the Sintang District Regent election was to give their voting rights and join the voting group organizing group, 2) the participation of first-time voters in Kecamatan Sepauk was limited to conventional political participation, 3) political participation supporting factors Beginner voters are individual factors, parent factors, environmental factors and family factors while the inhibiting factors for the participation of voters in participating are laziness, indifference, environmental factors and parents' factors.

Keywords : *Political Participation, Beginner Voter*

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula, sejauhmana partisipasi politik pemilih pemula dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati Kabupaten Sintang di Kecamatan Sepauk Periode 2016-2021. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi politik pemilih pemula, untuk mengetahui sejauhmana partisipasi politik pemilih pemula dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati Kabupaten Sintang di Kecamatan Sepauk Periode 2016-2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dan bentuk penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) bentuk partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Sintang adalah memberikan hak pilihnya dan bergabung dalam keanggotaan kelompok penyelenggara pemungutan suara, 2) partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Sepauk masih sebatas partisipasi politik konvensional, 3) faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula yaitu faktor individu, faktor orang tua, faktor lingkungan dan faktor keluarga sedangkan faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula dalam berpartisipasi yaitu rasa malas, perasaan acuh tak acuh, faktor lingkungan dan faktor orang tua.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula

A. Pendahuluan

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang sebagai warganegara untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Implementasi dari kegiatan ini mencakup beberapa tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat. Soleh (2014: 111) menyebutkan bahwa partisipasi secara umum dimaknai sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam satu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Keterlibatan tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan. Kesadaran masyarakat untuk memperbaiki suatu keadaan yang dirasakan bersama, pada dasarnya merupakan modal sosial yang sangat penting bagi proses pembangunan (*transformasi*) yang bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat di negara yang bersangkutan.

Menurut Sumanto (2009:160), partisipasi sering diberi makna keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah. Ada bermacam-macam faktor yang mendorong kerelaan untuk terlibat ini, bisa karena kepentingan, bisa juga karena solidaritas. Sementara itu, Tilaar (2009:287) mengungkapkan bahwa partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan

antarat lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Disisi lain Budiardjo (2013:367-369) mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberi suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah, anggota partai atau gerakan sosial. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Menurut Maran (2007 : 148), “bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara”. Partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Partisipasi Langsung.

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. (2) Partisipasi Tidak Langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Selanjutnya Almond (dalam Said 2007:97) membedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk aksi, yaitu : 1) Partisipasi politik konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang (normal) dalam demokrasi modern seperti : pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. 2) Partisipasi politik non-konvensional, yaitu kegiatan ilegal dan bahkan penuh kekerasan (*violence*) dan revolusioner, Seperti: pengajuan petisi, berdemonstrasi atau unjuk rasa, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya.

Partisipasi politik pada pemilihan Bupati Kabupaten Sintang disini dimaksudkan pada pemilih pemula, adapun pemilih pemula mayoritas memiliki rentang usia 17-21 tahun, kecuali jika telah menikah. Mayoritas pemilih pemula adalah pelajar (SMA) dan mahasiswa serta pekerja muda. Pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada Pemilu. Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 pasal 19 dan 20 menyatakan

bahwa pemilih pemula dapat dikatakan sebagai warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/ atau pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-undang pemilu.

Undang-undang No 23 tahun 2003 Pasal 7 menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian, pada Undang-undang No 10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih.

Partisipasi pemilih pemula ini dilakukan di masyarakat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Kecamatan Sepauk Merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Sintang yang seyogianya pemilih pemula memiliki tingkat yang tinggi peranannya dalam pemilihan Bupati.

B. Metode

Metode merupakan suatu strategi dalam membantu peneliti untuk mendapatkan suatu capaian yang diharapkan. Menurut Sugiyono (2015: 2) “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode deskriptif kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi (2012: 67) “metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya”.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian Studi Kasus. Studi kasus adalah penjelasan tentang berbagai kasus yang kita dapatkan dilapangan yang menyangkut masalah suatu kelompok, individu, lembaga, dan situasi sosial yang ada di masyarakat. Menurut Mulyana (2013:201) “studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau situasi sosial”. Selanjutnya Sumanto (2014 :191) “menyatakan studi kasus adalah penyelidikan yang mendalam dari suatu individu, kelompok, atau institusi”.

Afifuddin dan Saebani (2012:87) mengemukakan studi kasus adalah etnisitas tunggal atau fenomena (kasus) dari suatu masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, institusi atau keolompok sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi. Selanjutnya Nazir (2009:57) berpendapat bahwa studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

Studi kasus memiliki ciri khusus yang membedakan dengan penelitian yang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Narbuko dan Achmadi (2010:46) ciri-ciri studi kasus yakni: 1) Penelitian studi kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai kasus

tertentu yang hasil merupakan gambaran lengkap dan terorganim mengenai kasus itu penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus. 2) Studi kasus cenderung untuk meneliti jumlah unit yang kecil tetapi mengenai variabel-variabel dan kondisi yang besar jumlahnya.

Adapun langkah-langkahnya sebagaimana dikemukakan oleh Narbuko dan Achmadi (2010:47) mengungkapkan bahwa langkah-langkah dalam penelitian studi kasus yakni: 1) Merumuskan tujuan yang akan dicapai. 2) Merancang cara pendekatannya. 3) Mengumpulkan data. 4) Mengorganisasikan data dan informasi yang diperoleh itu menjadi rekonstruksi unit studi yang koheren dan terpadu secara baik. 5) Menyusun laporannya dengan sekaligus mendiskusikan makna hasil tersebut.

Pada dasarnya peneliti yang menggunakan studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang akan ditelitinya. Meski demikian, berbeda dengan yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu kasus.

Menurut Nurbuko dan Achmadi (2010:46), tujuan studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Selanjutnya Nazir (2009:57) mengemukakan tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta

karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Dari beberapa pendapat ahli di atas disimpulkan bahwa studi kasus bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara mendetail dan intensif mengenai pokok permasalahan yang diteliti yang berupa latar belakang dan sifat kasus yang berupa permasalahan dalam unit sosial, individu, kelompok masyarakat dan lembaga.

Manfaat studi kasus dalam hal pengumpulan data adalah dapat memberikan pemahaman informasi yang ada di masyarakat baik berupa isu sosial maupun masalah-masalah program, studi kasus juga bermanfaat memberikangambaran mengenai keadaan yang terjadi di dalam lembaga, keluarga dan individu yang kemudian dapat dicari solusinya sehingga akan menjadi lebih baik.

C. Pembahasan dan Hasil

a. Bentuk Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sintang di Kecamatan Sepauk Periode 2016-2021.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk partisipasi pemilih pemula yakni berbentuk: partisipasi langsung dan konvensional. Sebagaimana dikemukakan oleh Maran (2007 : 148), “bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara”. Partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: Partisipasi Langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi.

Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Selanjutnya Almond (dalam Said 2007:97) menyatakan partisipasi politik yang terjadi yaitu: Partisipasi politik konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang (normal) dalam demokrasi modern seperti : pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi.

b. Sejauhmana Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sintang di Kecamatan Sepauk Periode 2016-2021.

Partisipasi yang dilakukan oleh pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan bupati kabupaten Sintang yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa para pemilih pemula melaksanakan hak partisipasi politiknya berbentuk langsung yaitu melalui pemberian suara (*voting*) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan bergabung menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Partisipasi politik konvensional yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern seperti :

- a. Pemberian suara
- b. Diskusi politik
- c. Kegiatan kampanye
- d. Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan
- e. Komunikasi dengan pejabat politik dan administrasi

Kegiatan-kegiatan partisipasi pemilih pemula ini merupakan suatu bentuk kepeduliannya dalam keikutsertaanya dalam pesta demokrasi sebagai wujud bahwa sebagai generasi milenial harus turut serta dalam melaksanakan pesta rakyat yang terjadi lima tahun sekali. Partisipasi politik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua warga negara Indonesia. Hal ini sudah diatur didalam Undang-undang No 23 tahun 2003 Pasal 7 menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian, pada Undang-undang No 10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sintang di Kecamatan Sepauk Periode 2016-2021.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih pemula untuk berpartisipasi dan tidak berpartisipasi yaitu faktor individu, faktor keluarga, faktor pergaulan serta faktor pekerjaan/ kesibukan sehari-hari. Beberapa faktor penyebab pemilih pemula berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula	Individu	5
	Keluarga	2
	Pergaulan	1
	Pekerjaan/kesibukan sehari-hari	2
Jumlah Responden		10

Sumber: Analisis Data Peneliti (2019)

Terkait faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Surbakti (2010:184-185) menyebutkan dua *variable* penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (*variable independen*). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan.Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi

memilikiminat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar dan MacAndrews (2011:56-57) sebagai berikut : 1) Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komersialisme pertanian, industrialisasi, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas. 2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial baru sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas akibat era industrialisasi dan modernisasi. 3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern, ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara. 4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan seringkali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. 5) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya, meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

D.Simpulan

1. Bentuk partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan bupati kabupaten Melawi di kecamatan Menukung yaitu dengan dengan

memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara dan bergabung dalam keanggotaan kelompok penyelenggara pemungutan suara.

2. Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan bupati kabupaten Melawi di kecamatan Menukung tahun 2015 masih sebatas partisipasi politik spectator, yaitu hanya sebatas memberikan suara dan bergabung dengan kelompok kepentingan.
3. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal seperti kesadaran akan pentingnya berpartisipasi, rasa malas, sikap acuh tak acuh sedangkan faktor eksternal seperti faktor lingkungan keluarga, pergaulan dan kesibukan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Afifuddin & Beni, A. S., 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia
- HAR, Tilaar. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Rineka
- Maran Raga, Rafael. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Narbuko, C. & Achamadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nawawi, H. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nazir, M. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Soleh, Chabib. (2014). *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia

_____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumanto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Undang-undang No 23 tahun 2003 Tentang Syarat Usia pemilih.

Undang-undang No 10 tahun 2008 Tentang Syarat-Syarat pemilih dalam Pemilu.